Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner
Vol. 5, No. 2, April 2026, pp. 1184-1199
http://journal.amorfati.id/index.php/amorti | | ISSN 2962-9209

Interdisciplinary Scope of Contemporary Islamic Studies • Interdisciplinary Islamic Education • Interdisciplinary Islamic Law, Ethics, and Fatwa Studies • Interdisciplinary Islamic Economics, Finance, and Philanthropy • Islam, Society, and Culture • Islam, Politics, Governance, and Public Policy • Islam, Gender, Family, and Human Rights • Islam, Media, Communication, and Digital Da'wah • Islam, Health, Environment, and Sustainable Development • Islam, Science, Technology, Artificial Intelligence, and Digital Transformation

Populisme Kultural dan Demokrasi Lokal: Menimbang Ulang Demokrasi Melalui Pengalaman Politik Dedi Mulyadi Di Jawa Barat

Neneng Sobibatu Rohmah [a,1,*], Muhammad Riyan Fitria Ramdlani [b,2],

[*a] Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia;
[b] Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia;
[1]neneng.sobibatu@unsoed.ac.id; [2]muhammad.ramdlani@unsoed.ac.id
*Correspondent Author; Email Author

ARTICLE INFO

Article history
Received:
15-02-2026
Revised:
25-03-2026
Accepted:
07-04-2026

Keywords
Populisme,
Politik Lokal,
Dedi Mulyadi,
Demokrasi.

ABSTRAK

Fenomena populisme dalam demokrasi kontemporer tidak hanya hadir di tingkat nasional, tetapi juga bertransformasi di arena politik lokal. Artikel ini mengkaji ulang relasi antara populisme dan demokrasi dengan menelaah Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Dedi Mulyadi, memperlihatkan praktik populisme kultural melalui pendekatan budaya lokal dan kedekatan simbolik dengan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif-interpretatif untuk memahami dinamika populisme dalam konteks politik lokal dan kaitannya dengan demokrasi. Landasan teoritis yang digunakan mengacu pada Cas Mudde (2004) yang mendefinisikan populisme sebagai gerakan yang memanfaatkan sentimen kerakyatan untuk melawan status *quo elite*. Pun Dedi Mulyadi, melalui narasi visual, ia berhasil mentransformasikan media sosial menjadi ruang performatif dan memperkuat citra dirinya sebagai pemimpin yang merakyat, bukan hanya dengan aksi dan tindakan, tapi juga kedermawanan. Dalam kaitannya dengan demokrasi, populisme merupakan kritik tajam atas kegagalan *representative democracy*. Penelitian ini menguraikan paradoks populisme dengan menyoroti kepemimpinan populis yang memiliki kecenderungan melemahkan demokrasi karena kerap mengabaikan aturan, prosedur perundang-undangan serta aspirasi masyarakat. Selain itu, fenomena fanatisme dukungan terhadap tokoh populis sering kali berimbas pada timbulnya polarisasi di masyarakat. Dampak dari fanatisme politik yang berlebihan terhadap tokoh populis bisa sangat signifikan terhadap iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat. Dalam teori demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas, demokrasi seharusnya mengutamakan adanya ruang untuk diskusi yang terbuka, rasional, dan konstruktif. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengalaman politik Dedi Mulyadi dengan pendekatan populis dapat efektif secara politik, tapi harus diimbangi dengan

komitmen memperkuat institusi dan keterlibatan masyarakat secara lebih substantif.

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Pendahuluan

Populisme merujuk pada gaya politik yang memobilisasi ketidakpuasan masyarakat terhadap elite melalui narasi "rakyat versus penguasa" dan menawarkan solusi sederhana atas masalah kompleks. Lee (2017) menyebut populisme sebagai ideologi "tipis" yang membagi masyarakat menjadi rakyat bermoral versus elite korup. Pemimpin populis memanfaatkan situasi ini untuk membangun citra positif, menunjukkan kedekatan dan responsivitas terhadap aspirasi warga sehingga dipandang sebagai figur heroik atau "pahlawan" bagi sebagian masyarakat (Haboddin, 2019).

Populisme di Indonesia berkembang tidak hanya di level nasional tetapi juga lokal, kesuksesan Jokowi dalam menghadirkan politik inklusif, merakyat, dan responsif, melalui blusukan, citra anti-korupsi, dan kedekatan dengan publik menjadi model di level nasional yang menginspirasi munculnya pemimpin populis di berbagai daerah (Margiansyah, 2019). Populisme di tingkat lokal misalnya, melalui figur Dedi Mulyadi yang membangun citra kedekatan dengan rakyat lewat gaya kepemimpinannya yang sering turun langsung ke masyarakat untuk menyelesaikan persoalan secara cepat.

Dalam politik Indonesia saat ini, hubungan antara populisme dan demokrasi menunjukkan dinamika yang tidak sepenuhnya selaras. Di satu sisi, populisme muncul sebagai respons terhadap kelemahan representasi dalam sistem demokrasi, terutama ketika sebagian masyarakat merasa tidak didengar oleh elite politik. Namun di sisi lain, populisme juga dapat mengurangi kualitas demokrasi apabila terlalu menonjolkan peran individu dan dapat melemahkan fungsi institusi formal. Pola ambivalen ini terlihat jelas dalam praktik politik Dedi Mulyadi, yang membangun citra diri sebagai pemimpin dekat dengan rakyat melalui simbol budaya Sunda, gaya komunikasi yang sederhana, serta keterlibatan langsung dalam persoalan masyarakat. Pendekatan ini efektif menarik dukungan karena memberi kesan bahwa politik kembali pada kebutuhan dan suara rakyat. Meski demikian, strategi tersebut juga menunjukkan risiko personalisasi politik yang dapat menggeser orientasi demokrasi dari proses institusional menuju ketergantungan pada figur tertentu (Welak, 2022). Pengalaman politik Dedi Mulyadi menggambarkan bagaimana populisme dapat menjadi sarana memperbaiki jarak antara rakyat dan negara, namun sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi keberlanjutan demokrasi yang berbasis mekanisme dan institusi yang kuat. Hal tersebut disebabkan karena sering mengabaikan dialog terbuka dan memperhatikan hak-hak minoritas sehingga kebijakan cenderung berpihak pada mayoritas tanpa memperhatikan kepentingan kelompok minoritas (Agrraeni et al., 2023).

Syaidah dkk. (2025) menyatakan bahwa Dedi Mulyadi menampilkan gaya politik yang dekat dengan masyarakat dan memanfaatkan simbol-simbol budaya Sunda sebagai bagian dari strategi komunikasinya. Simbol seperti penggunaan totopong atau iket khas Sunda, salam "sampurasun," serta berbagai filosofi lokal menjadi instrumen legitimasi politik yang memperkuat kedekatannya dengan identitas masyarakat Jawa Barat sekaligus menegaskan

basis moral "rakyat Sunda" sebagai fondasi dukungan politiknya. Melalui penekanan konsisten pada akar budaya Sunda sebagai pijakan pembangunan wilayah dalam pidato maupun kebijakan publik, populisme kultural dalam kepemimpinan Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat menjadi semakin menonjol. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat daya tarik politiknya, tetapi juga membentuk citra kepemimpinan yang dianggap merepresentasikan nilai-nilai kearifan lokal.

Kedekatan Dedi Mulyadi dengan masyarakat tidak hanya dibangun melalui simbol-simbol budaya Sunda yang ia tampilkan dalam berbagai kegiatan publik, tetapi juga melalui cara ia memproyeksikan citra kepemimpinannya melalui penggunaan media sosialnya. Media sosial Dedi Mulyadi kemudian menjadi medium yang memperluas strategi populisme kultural tersebut. Platform digital dimanfaatkan olehnya tidak hanya untuk publikasi kinerja, tetapi juga untuk membangun kedekatan emosional melalui konten aksi spontan, kedermawanan, dan interaksi langsung dengan warga yang direkam secara natural. Berdasarkan penelusuran terkait aktivitas digital Dedi Mulyadi, tingkat popularitas Dedi Mulyadi dapat dibuktikan melalui akun *youtube* @kangdedimulyadichannel yang memiliki 8,58 juta *subscribers* dan unggahah video sebanyak 4.600 video. Melalui media sosial, ia menampilkan diri sebagai pemimpin yang hadir dalam keseharian masyarakat, responsif terhadap keluhan, dan dekat secara emosional. Perpaduan antara simbol budaya, komunikasi sederhana, performativitas keseharian, dan tindakan langsung yang dikemas dalam konten digital menjadikan Dedi sebagai contoh nyata populisme di tingkat lokal (Syaidah et al., 2025).

Populisme kultural dapat memperkuat demokrasi lokal melalui kedekatan pemimpin dengan rakyat serta pengakuan pada identitas budaya. Namun, ketika popularitas dan performa individu lebih dominan daripada transparansi kebijakan dan ruang diskusi rasional, kualitas demokrasi justru melemah. Media sosial berpotensi mengubah pengawasan publik menjadi sekadar konsumsi konten, bukan evaluasi kritis. Oleh karena itu, hubungan populisme dan demokrasi bersifat ambivalen, yaitu dapat meningkatkan responsivitas dan partisipasi, tetapi sekaligus menimbulkan polarisasi dan memperlemah institusi. Kasus Dedi Mulyadi menunjukkan bahwa populisme kultural yang efektif secara elektoral tetap perlu diawasi agar tidak menggerus prinsip demokrasi substantif.

Argumen penelitian ini adalah praktik populisme kultural yang dilakukan Dedi Mulyadi melalui penggunaan simbol budaya Sunda, narasi kedekatan dengan rakyat, dan performativitas di media sosial tidak hanya menguatkan konsep populisme sebagaimana dijelaskan Mudde dan Laclau, tetapi juga menunjukkan bagaimana populisme bekerja secara kultural dan visual di tingkat lokal. Namun, dalam perspektif demokrasi deliberatif Habermas, populisme kultural ini sekaligus menghadirkan persoalan karena ruang publik digital yang dibangun tidak menghasilkan dialog rasional, melainkan berubah menjadi ruang pertunjukan yang emosional dan personalistik. Dengan demikian, penelitian ini berargumen bahwa populisme kultural memang efektif memperkuat legitimasi politik dan kedekatan pemimpin dengan warga, tetapi di saat yang sama berpotensi melemahkan kualitas demokrasi lokal melalui personalisasi kekuasaan, fanatisme pendukung, dan menurunnya proses deliberasi publik.

Pertanyaan penelitian ini berlatar dari munculnya fenomena populisme kultural dalam kepemimpinan Dedi Mulyadi yang memperlihatkan bagaimana simbol budaya Sunda, narasi kedekatan dengan rakyat, dan strategi komunikasi digital digunakan sebagai instrumen politik di tingkat lokal. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini

adalah bagaimana praktik populisme kultural Dedi Mulyadi dalam politik lokal Jawa Barat, dan apa implikasi praktik populisme kultural tersebut terhadap kualitas demokrasi lokal.

Sebagai landasan teoretis untuk memahami dinamika populisme dalam konteks Indonesia, penting meninjau temuan penelitian terdahulu yang mengkaji dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Hilmy (2020) meneliti fenomena gerakan populisme dan dampaknya terhadap kemunduran demokrasi di berbagai negara. Penelitian ini menemukan bahwa populisme mendorong lahirnya kebijakan yang diskriminatif, meningkatkan polarisasi sosial, dan melemahkan kualitas demokrasi. Studi ini menunjukkan bagaimana populisme di Indonesia, Amerika Serikat, India, Inggris hingga Amerika Latin cenderung memicu disintegrasi sosial dan memperkuat sektarianisme melalui propaganda politik dan disinformasi media. Temuan Hilmy menegaskan bahwa menguatnya populisme berkontribusi signifikan pada erosi demokrasi modern (Hilmy, 2020).

Sejalan dengan temuan Hilmy (2020) mengenai bagaimana populisme dapat melemahkan kualitas demokrasi, penelitian Kiki Esa Perdana (2025) memberikan ilustrasi lebih spesifik melalui studi kasus Pilgub Jawa Barat 2024. Penelitian Kiki Esa Perdana (2025) menyoroti strategi komunikasi politik populis pasangan Dedi Mulyadi–Erwan Hermawan pada Pilgub Jawa Barat 2024, terutama bagaimana citra pro-rakyat dibangun melalui retorika sederhana dan penggunaan media sosial untuk menarik pemilih muda serta kelas menengah-bawah. Dominasi figur Dedi melalui konten keseharian dan simbol budaya Sunda memperkuat personal branding, meski berpotensi menimbulkan konsentrasi figur dan penyederhanaan isu. Secara keseluruhan, komunikasi populis terbukti ampuh secara elektoral di era digital, tetapi mengandung risiko bagi kualitas demokrasi karena kecenderungannya mereduksi persoalan menjadi narasi emosional jangka pendek (Perdana, 2025).

Temuan Hilmy (2020) dan Perdana (2025) mengenai bagaimana populisme bekerja dalam melemahkan kualitas demokrasi juga sejalan dengan analisis Sihidi dkk. (2020) yang menyoroti penggunaan populisme berbasis agama dalam Pemilu Presiden 2019. Sihidi dkk. (2020) membahas bagaimana Pemilu Presiden 2019 menunjukkan kuatnya penggunaan populisme berbasis agama oleh Jokowi dan Prabowo untuk memperkuat citra politik dan menarik dukungan pemilih. Dengan metode kualitatif berbasis kajian pustaka, penelitian memetakan praktik populisme Islam kedua kandidat melalui berbagai sumber literatur dan data resmi KPU. Hasilnya, Jokowi unggul berkat dukungan NU dan kelompok nasionalis, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, serta wilayah mayoritas non-Muslim. Sementara itu, Prabowo menang besar di daerah dengan karakter Islam puritan seperti Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Banten. Temuan ini menegaskan bahwa politisasi agama berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilu dan kemungkinan terus digunakan dalam kontestasi politik berikutnya (Sihidi et al., 2020).

Research gap dari ketiga penelitian tersebut terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus meneliti populisme kultural di tingkat lokal serta bagaimana praktik tersebut mempengaruhi kualitas demokrasi dan ruang publik khususnya dalam pengalaman politik Dedi Mulyadi di Jawa Barat. *Pertama,* penelitian Kiki Esa Perdana (2025) berfokus pada strategi komunikasi populis pasangan Dedi Mulyadi–Erwan Hermawan dalam kontestasi elektoral, tetapi belum menggali penggunaan simbol budaya sebagai basis kultural populisme maupun dampaknya terhadap demokrasi lokal. *Kedua, gap* studi Hilmy (2020) terletak pada populisme memengaruhi kualitas demokrasi pada level lokal melalui mekanisme budaya dan performativitas digital. Hilmy (2020) hanya membahas hubungan populisme dengan demokrasi pada skala global dan nasional. *Ketiga*, penelitian Sihidi dkk. (2020) membahas

populisme Islam dalam skala nasional Pemilu 2019 sehingga tidak melihat dimensi kultural maupun dinamika populisme dalam konteks pemerintahan dan politik lokal.

Ketiga penelitian tersebut menyisakan celah karena belum ada kajian yang secara khusus menelaah bagaimana populisme kultural Dedi Mulyadi bekerja melalui simbol budaya Sunda, narasi kesederhanaan, dan performativitas digital dalam membangun legitimasi politik di tingkat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang menghubungkan praktik politik Dedi dengan konsep demokrasi deliberatif Habermas untuk melihat dampaknya terhadap ruang publik dan kualitas demokrasi. Penelitian ini menawarkan kebaruan teoretis dengan mengintegrasikan kerangka populisme Mudde–Laclau dan konsep ruang publik Habermas, serta kebaruan empiris melalui analisis mendalam mengenai praktik populisme kultural Dedi beserta konsekuensinya, seperti meningkatnya polarisasi dan berkurangnya ruang dialog yang substantif. Secara analitis, penelitian ini menunjukkan bahwa kedekatan emosional yang dibangun melalui simbol budaya dan media digital dapat memperkuat legitimasi politik, tetapi juga menciptakan ruang publik yang lebih menonjolkan tampilan dan impresi dibandingkan pertukaran gagasan yang mendalam.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, metodologi penelitian kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari individu maupun kelompok (Safarudin et al., 2023). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami makna, konteks, serta dinamika sosial secara mendalam. Selain itu, penelitian ini juga dilandasi oleh perspektif studi kasus. Dalam Harahap (2020), perspektif studi kasus dipahami sebagai pendekatan yang mempelajari suatu kejadian, situasi, atau peristiwa sebagai fenomena sosial yang memiliki konteks dan karakteristik tertentu. Perspektif ini bertujuan mengungkap keunikan dan kekhasan yang terdapat dalam kasus yang diteliti, sehingga mampu memberikan gambaran yang kaya dan mendalam mengenai fenomena tersebut (Ilhami et al., 2024). Dengan demikian, kombinasi metode kualitatif dan perspektif studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana populisme kultural Dedi Mulyadi terbentuk dan beroperasi dalam konteks politik lokal.

Hasil dan Pembahasan

1. Populisme Kultural dan Dedi Mulyadi Jawa Barat

a) Teori Populisme: Ideologi, Gaya, dan Strategi Politik

Cas Mudde menjelaskan populisme sebagai sebuah ideologi yang memandang masyarakat terbelah secara tegas ke dalam dua kelompok yang homogen dan saling berlawanan, yaitu "rakyat yang murni" dan "elit yang korup." Ideologi ini menekankan bahwa politik idealnya harus menjadi cerminan *volonté générale*, yakni kehendak umum dari rakyat (Ufen, 2019). Pendekatan yang dikemukakan Cas Mudde menitikberatkan analisis pada gagasan, retorika, serta manuver politik yang dilakukan aktor populis. Pendekatan ini berpijak pada tiga elemen utama, yaitu "rakyat" (*the people*), "elit" (*the elite*), dan "kehendak umum rakyat" (*the general will of the people*). Menurut Cas Mudde, strategi politik populisme kontemporer banyak memanfaatkan "logika media" yang menonjolkan personalisasi, permainan emosi, serta sikap anti-kemapanan untuk memperoleh dukungan publik (Margiansyah, 2019). Menurut Mudde dan Kaltwasser (2017), populisme begitu fleksibel adalah karena ia dapat melekat pada berbagai ideologi, seperti sosialisme, nasionalisme, rasisme, anti-imperialisme, hingga neoliberalisme.

Menurut Mudde (2007), populisme memiliki tiga karakter utama, yaitu anti-kemapanan, otoritarianisme, dan nativisme. Anti-kemapanan menempatkan rakyat sebagai kelompok yang homogen, bermoral, dan lebih layak memegang kuasa dibanding elite yang dianggap korup. Otoritarianisme muncul melalui dukungan terhadap pemimpin kuat dan karismatik yang dianggap sebagai satu-satunya wakil kehendak rakyat. Sementara itu, nativisme menekankan identitas "asli" dan cenderung eksklusif terhadap nilai atau kelompok yang dianggap asing sehingga berpotensi melemahkan pluralisme dalam demokrasi (Ritonga & Adela, 2020).

Dalam perspektif Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, populisme dipahami sebagai strategi berbasis argumen yang membentuk identitas politik "rakyat" melalui penyatuan berbagai tuntutan sosial yang heterogen dalam rantai kesamaan (*chain of equivalence*). Identitas "rakyat" bukanlah entitas yang alami, melainkan konstruksi diskursif yang dibangun lewat penanda kosong (*empty signifier*) seperti "keadilan" atau "perubahan" yang mampu menampung aspirasi beragam kelompok. Dengan menciptakan pembelahan antagonistik antara "rakyat" dan "elite", populisme menjadi strategi hegemonik untuk menantang tatanan dominan dan mengkritik keterbatasan demokrasi liberal (Aprilianto, 2025).

b) Populisme Kultural dalam Konteks Indonesia

Buku karya (Herkman, 2022) dengan judul "*A Cultural Approach to Populism"* Herkman menjelaskan bahwa cultural populism melihat populisme bukan sekadar ideologi atau strategi politik, melainkan proses membangun identitas "rakyat" melalui simbol, narasi, emosi, dan praktik budaya. Pendekatan ini menyoroti bagaimana batas "kita" vs "mereka" dibentuk lewat representasi budaya seperti bahasa sehari-hari, gaya komunikasi, nostalgia, moralitas, hingga simbol nasional. Herkman menekankan bahwa budaya menjadi fondasi penting populisme karena politik populis selalu menghadirkan cerita yang memberikan identitas dan keterikatan emosional bagi para pendukungnya. *Cultural populism* tampak dalam hubungan populisme dengan media, terutama media digital yang memperkuat gaya politik emosional, personal, dan antagonistik. Media menjadi bagian dari konstruksi budaya populis yang membentuk narasi "rakyat" dan "elit". Oleh karena itu, populisme kini dipahami sebagai fenomena budaya yang menggunakan simbol, gaya hidup, dan ekspresi identitas. Dalam konteks ini, Dedi Mulyadi menjadi contoh jelas melalui penggunaan simbol budaya Sunda dan gaya komunikasi akrab yang ia bangun lewat media sosial dan interaksi publik.

Populisme lokal dipahami sebagai strategi kepala daerah untuk mempertahankan kekuasaan melalui kebijakan yang langsung memenuhi kebutuhan dasar warga, seperti pendidikan dan kesehatan gratis. Pemimpin lokal membangun citra kedekatan dengan rakyat sehingga memperoleh legitimasi kuat meski tanpa dukungan partai. Pola ini melahirkan politik yang sangat berpusat pada figur, membuat kepala daerah memiliki pengaruh besar dalam birokrasi dan legislatif daerah (Haboddin, 2019). Dedi Mulyadi menjadi contoh populisme lokal melalui kebijakan langsung untuk warga miskin, seperti layanan kesehatan daerah, serta gaya pemimpin cepat tanggap dan performatif yang ia tampilkan lewat aksi bantuan dan aktivitas digital sehingga citranya sebagai pemimpin dekat rakyat semakin kuat.

c) Kepemimpinan Dedi Mulyadi di Jawa Barat

Karier Dedi Mulyadi di Jawa Barat dimulai dari DPRD Purwakarta, lalu menjadi Wakil Bupati (2003–2008) dan Bupati (2008–2018). Selama menjabat, ia mendorong kebijakan berbasis budaya Sunda, seperti revitalisasi seni, pariwisata lokal, penataan ruang publik, dan program kesejahteraan yang membuat Purwakarta dikenal sebagai kota bernuansa budaya Sunda (Oksibil, 2025). Dedi Mulyadi pernah maju di Pilgub Jabar 2018 tapi kalah, lalu menjabat

anggota DPR RI 2019–2024 dan Ketua Komisi IV. Pada 2022 ia pindah dari Golkar ke Gerindra dan kembali terpilih sebagai DPR RI 2024–2029. Pada Pilgub Jabar 2024, ia maju kembali dan akhirnya terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat (Bagaskara, 2024). Ketika ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, banyak kebijakan kontroversi yang ia buat, seperti pendidikan militer untuk anak nakal, peniadaan wisuda, dan gerakan donasi secara sukarela sehari seribu rupiah.

Dedi Mulyadi memanfaatkan media digital, terutama YouTube, untuk membangun citra kedekatan dengan rakyat lewat narasi keseharian. Ia rutin mengunggah 1–3 video per hari, seperti dalam konten "*KDM BERENCANA LAPOR KEJAGUNG | SELAMATKAN SUNGAI YANG HILANG"* yang menampilkan ucapan terima kasih warga, simbol budaya Sunda, serta pernyataannya soal alih fungsi lahan di DAS. Dalam video itu, Dedi menegaskan akan melapor ke Kejaksaan Agung, menjelaskan estimasi biaya penertiban, dan menekankan pentingnya regulasi untuk menjaga kelestarian sungai.



Gambar 1. Aktivitas Pembinaan Karakter Siswa melalui Latihan Bergaya Militer

Konten selanjutnya dengan judul "*Kunjungi Barak Resimen 1 Kostrad | Kondisi Siswa Binaan Perubahannya Bikin Bahagia,"* Dedi Mulyadi meninjau program pembinaan siswa bermasalah di markas Resimen 1 Kostrad, yang menekankan kedisiplinan melalui rutinitas militer. Ia melihat perubahan positif pada para siswa tidur teratur, bangun pagi, serta mengikuti pola hidup disiplin serta memastikan mereka mendapat asupan bergizi. Dedi menilai program ini tidak hanya mendisiplinkan, tetapi juga merehabilitasi karakter dan membawa dampak emosional positif. Di akhir kunjungan, ia memberi motivasi dan menjanjikan penghargaan bagi siswa yang menunjukkan kemajuan, termasuk kesempatan menjadi petugas pengibar bendera pada hari kemerdekaan.

Menurut Aji (2025), Dalam tiga bulan pertama menjabat, Dedi Mulyadi tampil dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan terpusat, mengambil keputusan cepat, serta intens turun langsung membantu warga. Penggunaan bahasa Sunda, kesederhanaan, dan gaya komunikasinya yang membumi di media sosial memperkuat citranya sebagai pemimpin yang dekat dan autentik (Braokah et al., 2025). Berbagai kebijakan dan tindakan Dedi Mulyadi menunjukkan karakter kepemimpinan populis. Program seperti pembinaan siswa bermasalah dengan pendekatan militer, peniadaan wisuda, hingga gerakan donasi seribu rupiah perhari menggambarkan solusi cepat yang mudah dipahami publik, meski sering memicu kontroversi karena minim kajian mendalam. Melalui media digital, Dedi semakin menegaskan citra "pemimpin hadir di tengah rakyat" memperlihatkan bagaimana populisme kultural dijalankan dalam praktik pemerintahan lokal dan dimanfaatkan untuk membangun legitimasi politik.

Populisme dan Tantangan terhadap Demokrasi Deliberatif

a) Konsep Dasar Demokrasi Deliberatif Habermas

Dalam *Between Facts and Norms*, Jurgen Habermas menegaskan bahwa negara hukum demokratis hanya dapat bertahan melalui demokrasi partisipatif. Dalam model demokrasi deliberatif, proses pembentukan hukum harus terbuka bagi keterlibatan publik melalui media dan organisasi sosial, sehingga ruang publik berfungsi sebagai arena diskursus yang memengaruhi arah kebijakan dan peraturan (Muthhar, 2016). Habermas (*The Structural Transformation of the Public Sphere*) menjelaskan bahwa ruang publik lahir pada abad ke-18 sebagai forum borjuis membahas isu sosial dan politik secara rasional, meski hanya diakses pemilik properti. Dengan kapitalisme modern, debat rasional digantikan konsumsi massal, manipulasi opini, dan politik citra. Ia membedakan ruang publik yang bebas dari kekuasaan dan yang dikuasai pasar atau birokrasi untuk kepentingan aktor kuat (Prasetyo, 2012).

Demokrasi deliberatif menekankan bahwa keputusan politik harus lahir dari partisipasi publik melalui dialog, pertukaran argumen, dan pencarian kebenaran bersama tanpa dominasi. Model ini muncul sebagai kritik terhadap demokrasi liberal yang hanya bertumpu pada suara terbanyak. Dalam kerangka deliberatif, kebijakan dianggap sah bila telah melalui konsultasi publik yang luas dan terbuka, sehingga keputusan menjadi lebih rasional, adil, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi (Muthhar, 2016).

Habermas (1996) menegaskan bahwa ruang publik adalah elemen kunci dalam demokrasi deliberatif, karena keputusan politik harus lahir dari diskusi yang rasional, terbuka, dan inklusif. Ruang publik memungkinkan warga membentuk opini, mengkritik, dan mengangkat isu sosial yang kemudian memengaruhi lembaga formal. Media seharusnya mendukung proses ini dengan menyediakan informasi kritis, meski sering melemah karena kepentingan pasar dan politik. Karena itu, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh ruang publik yang hidup dan mampu mengawasi negara melalui argumen rasional, bukan manipulasi atau logika elektoral semata (Prasetyo, 2012).

Populisme bekerja melalui emosi dan performativitas, berlawanan dengan demokrasi deliberatif Habermas yang menekankan dialog rasional. Kerangka Habermas membantu menilai apakah tindakan pemimpin populis membuka ruang diskusi atau hanya menghadirkan pertunjukan politik. Dalam kasus Dedi Mulyadi di ruang digital, pendekatan ini penting untuk melihat apakah media digital menjadi arena deliberatif atau sekadar memperkuat citra populis tanpa kritik.

b) Paradoks Populisme dan Demokrasi Lokal

Canovan (2004) menjelaskan bahwa populisme muncul sebagai respons terhadap kegagalan demokrasi perwakilan dalam menyalurkan aspirasi rakyat. Dahl (1992) menekankan bahwa demokrasi representatif tetap penting karena kompleksitas masyarakat modern yang tidak memungkinkan partisipasi langsung seluruh warga. Populisme muncul ketika kepercayaan terhadap lembaga perwakilan menurun, berfungsi sebagai sarana alternatif bagi rakyat untuk menyuarakan tuntutan. Di sisi lain, populisme dapat memperluas ruang partisipasi publik dan memperkuat aspek demokratis, meski berpotensi menimbulkan dominasi figur dan penyimpangan nilai-nilai liberal. Canovan menekankan bahwa pemimpin populis sering mengklaim diri sebagai representasi otentik kehendak rakyat dan sumber legitimasi demokratis, walaupun klaim tersebut tidak selalu mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat (Marwah et al., 2024).

Populisme berdampak negatif pada demokrasi, seperti meningkatnya polarisasi "kita versus mereka" yang menyempitkan ruang dialog dan kompromi. Pemimpin populis sering melemahkan institusi demokrasi, mendiskreditkan parlemen, peradilan, dan media independen, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap *checks and balances*. Penyebaran disinformasi dan hoaks melalui media digital dapat menyesatkan pemilih, mengancam legitimasi pemilu, dan memicu konflik sosial. Kebijakan berbasis sentimen populis kerap kurang riset, berisiko merugikan tata kelola politik dan ekonomi, serta mengabaikan pluralisme, toleransi, dan hak minoritas. Meski populisme kadang memperluas partisipasi rakyat, risiko negatifnya perlu diantisipasi (Kasanova & Rudiyanto, 2024).

Menurut Hadiz dalam Deha, populisme di Indonesia tidak selalu mencerminkan budaya demokrasi, tetapi dapat menjadi ancaman jika dijalankan melalui propaganda ekstrem. Warisan otoritarian Orde Baru membuat demokrasi Indonesia rentan terhadap kecenderungan populis, sementara arus informasi yang tidak terkontrol memperkuat polarisasi politik dan permainan identitas. Sejalan dengan Mouffe, populisme bersifat fleksibel dan berubah sesuai konteks politik, sehingga dapat beradaptasi dengan berbagai struktur institusional, tetapi berpotensi menimbulkan instabilitas demokrasi lokal melalui mobilisasi sentimen identitas dan pembelahan masyarakat (Junaeda & Khaerunnisa, 2024). Dengan karakter populisme yang fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dengan konteks politik, sebagaimana dipaparkan Hadiz dalam Deha dan Mouffe, praktik populisme di Indonesia cenderung memperkuat fanatisme pendukung dan polarisasi politik, terutama ketika sentimen identitas dimobilisasi melalui arus informasi yang tidak terkontrol dan propaganda yang bersifat ekstrem.

Dalam demokrasi, populisme yang menekankan dikotomi "rakyat versus elit" sering menciptakan narasi emosional dan simplifikatif sehingga mengganggu diskusi rasional. Pemimpin populis yang mengklaim diri sebagai wakil sah rakyat mudah melabeli kritik sebagai suara elit, menimbulkan kultur anti-intelektualisme dan delegitimasi terhadap ahli, media, maupun lembaga demokrasi. Akibatnya, masyarakat menerima pesan politik secara hitam-putih, diskursus publik berubah menjadi perang opini berbasis identitas, dan rasionalitas publik melemah, mengancam partisipasi warga, dialog, kompromi, serta pencarian solusi bersama.

Menimbang Ulang Demokrasi Melalui Pengalaman Dedi Mulyadi

Melalui gaya komunikasi Dedi yang sering menggunakan bahasa Sunda, humor, metafora tradisi, dan menampilkan identitas budaya Sunda dalam agendanya muncul teks-teks politik yang mengemas kekuasaan sebagai sesuatu yang akrab, empatik, dan membumi. Narasi yang dibangun bukan mengenai program teknokratis, tetapi tentang harmoni sosial, penghormatan pada leluhur, dan nilai gotong royong sebagai dasar moralitas publik. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang ia buat, seperti mewajibkan penggunaan pakaian adat Sunda pada hari-hari tertentu, menghadirkan arsitektur gedung pemerintahan dengan sentuhan khas Sunda, serta membangun taman-taman tematik yang terinspirasi dari cerita rakyat lokal (Sudjaya, 2025).

Dalam kerangka demokrasi deliberatif Habermas, fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal di Jawa Barat bekerja melalui logika kultural yang berbeda dari model deliberatif ideal. Jika demokrasi deliberatif menuntut ruang publik yang rasional, terbuka, dan setara, maka praktik politik Dedi menghasilkan bentuk demokrasi yang berakar pada budaya dan relasi sosial masyarakat Sunda, di mana legitimasi dibangun lewat kedekatan emosional

dan simbol-simbol tradisi ketimbang argumentasi rasional. Hal ini menegaskan bahwa demokrasi tidak pernah hadir dalam ruang yang netral, melainkan selalu berkelindan dengan konteks budaya dan struktur sosial yang membentuk cara warga memaknai kekuasaan dan partisipasi. Dengan kata lain, pengalaman politik lokal, seperti ini memperlihatkan bahwa demokrasi yang hidup di tingkat akar rumput bersifat kontekstual dan kultural berjalan melalui bahasa, nilai, dan praktik budaya setempat sehingga sering kali tidak sepenuhnya memenuhi prasyarat deliberatif Habermas, tetapi mencerminkan bentuk demokrasi yang sesuai dengan pandangan sosial masyarakatnya.

Dalam model Habermas, demokrasi ideal dibangun melalui ruang publik yang mendorong pertukaran argumen rasional, proses diskursif yang setara, dan pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan yang komunikatif. Namun, dalam konteks politik lokal yang ditampilkan melalui figur Dedi, demokrasi tidak diwujudkan melalui debat rasional atau forum deliberatif, melainkan melalui representasi moral dan tindakan langsung yang dianggap mencerminkan kepedulian. Respons cepat dan tindakan empatik pemimpin dipandang lebih bernilai daripada proses dialog. Dengan demikian, yang muncul adalah praktik demokrasi yang legitimasinya bersumber dari kedekatan sosial, bukan dari prosedur deliberatif formal sebagaimana digambarkan Habermas.

Dengan demikian, pengalaman politik lokal seperti kasus Dedi Mulyadi menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kultur dan relasi sosial masyarakatnya. Demokrasi berkembang melalui bahasa budaya, simbol lokal, dan praktik keseharian yang membentuk persepsi warga tentang kepemimpinan. Alih-alih dipandang sebagai penyimpangan dari demokrasi ideal, bentuk-bentuk lokalisasi ini justru membuka ruang refleksi bahwa demokrasi harus dirumuskan ulang dengan mempertimbangkan bagaimana masyarakat memahami kekuasaan, representasi, dan keadilan dalam konteks budaya mereka sendiri.



Gambar 2. Kebijakan Pemutihan Kendaraan Bermotor Dibuat Oleh Dedi Mulyadi

Gaya politik Dedi Mulyadi memperlihatkan bahwa populisme lokal tidak sekadar strategi menarik simpati, tetapi gejala lebih dalam dari krisis representasi yang dirasakan masyarakat. Ketika saluran politik formal dianggap jauh, birokrasi tidak responsif, dan wakil rakyat tidak benar-benar memahami kebutuhan warga, muncul kerinduan terhadap figur yang tampak autentik, hadir, dan mudah dijangkau. Contohnya kebijakan perpanjangan penghapusan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan Dedi Mulyadi yang diungkapkan sebagai bentuk bantuan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat Jawa Barat. Dalam konteks inilah Dedi Mulyadi mengisi kekosongan representasi dengan performativitas kedekatan, melalui kebijakan ia menunjukkan responsivitas terhadap beban warga. Tindakan semacam

ini membentuk wacana bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang terlihat bekerja, cepat bertindak, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Narasi yang dibangun Dedi melalui konten video maupun interaksi langsung menampilkan dirinya sebagai figur yang menghadirkan negara lebih dekat dengan masyarakat. Setiap percakapan dengan warga, keluhan yang direspons, atau gestur sederhana menjadi teks yang memperlihatkan tidak adanya mekanisme representasi formal. Ketika warga merasa lebih mudah mengadukan masalah ke seorang figur daripada ke lembaga pemerintahan, muncul penegasan bahwa institusi demokrasi tidak lagi menjadi tempat pertama yang dipercaya. Dengan kata lain, popularitas Dedi mencerminkan kebutuhan masyarakat akan representasi yang tidak hanya administratif, tetapi juga emosional dan moral.

Dedi sering memposisikan dirinya memahami rakyat kecil, menolak jarak hierarkis, dan menegaskan bahwa pemimpin harus ikut merasakan apa yang dirasakan warga. Contoh kasus terlihat ketika ia menangani penolakan kebijakan peniadaan wisuda. Dalam dialog dengan keluarga siswi yang masih tinggal di bantaran sungai namun menuntut wisuda berbiaya besar, ia menegaskan pentingnya memprioritaskan kebutuhan yang lebih positif, bahkan menegur, "*Anda miskin tapi jangan sok kaya*." Kasus dialog Dedi dengan keluarga siswi yang menolak peniadaan wisuda memperlihatkan bagaimana kedekatan menjadi performa populis yang mengonstruksi batas antara "rakyat miskin yang rasional" dan "gaya hidup elitis yang dipaksakan". Teguran Dedi agar dana digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting dibaca publik sebagai keberpihakan otentik terhadap warga kecil sehingga hadirnya pemimpin langsung di lapangan dianggap lebih efektif daripada saluran representasi formal yang dinilai tidak lagi responsif terhadap kepentingan rakyat.

Praktik populisme Dedi juga memperlihatkan bagaimana personalisasi kekuasaan menjadi respons terhadap ketidakpuasan struktural masyarakat. Banyak persoalan yang seharusnya ditangani oleh lembaga formal, seperti kesejahteraan, konflik sosial, atau bahkan urusan kecil administrasi tapi diselesaikan oleh satu figur. Hal ini menunjukkan preferensi masyarakat terhadap hubungan personal ketimbang prosedural. Di sisi lain, fenomena ini mengungkapkan paradoks bahwa populisme bisa mengisi kekosongan representasi, tetapi sekaligus dapat mengikis fungsi institusi demokrasi karena kepercayaan publik bergeser ke figur, bukan ke mekanisme.

Dengan demikian, gaya politik Dedi Mulyadi menjadi cermin dari keinginan publik akan model representasi yang lebih dekat, *relatable*, dan dianggap tulus. Populisme dalam konteks ini bukan sekadar retorika, melainkan respons terhadap keterputusan antara rakyat dan institusi politik. Kasus Dedi menunjukkan bahwa kerinduan terhadap pemimpin yang autentik berakar pada ketidakpuasan mendalam terhadap sistem representasi demokratis yang belum mampu menghadirkan rasa keadilan, perhatian, dan kehadiran yang dirasakan nyata oleh masyarakat.

Pengalaman politik lokal melalui figur seperti Dedi Mulyadi membuka peluang bagi demokrasi untuk kembali menjadi ruang yang hidup dan relevan bagi warga. Dengan memanfaatkan simbol dan nilai budaya Sunda, seperti prinsip *silih asah, silih asih, silih asuh,* penghormatan pada leluhur, serta narasi harmoni antarwarga. Dedi mampu menarik partisipasi publik yang sebelumnya pasif. Banyak warga yang biasanya enggan berinteraksi dengan perangkat pemerintahan merasa lebih nyaman menyampaikan aspirasi ketika simbol-simbol kultural digunakan sebagai bahasa politik. Revitalisasi partisipasi ini terlihat dari keterlibatan warga dalam kegiatan yang diinisiasi Dedi, perbincangan publik yang tercipta

spontan di ruang-ruang yang ia kunjungi hingga keberanian warga untuk memaparkan persoalan pribadi maupun sosial tanpa rasa takut. Dalam konteks ini, demokrasi lokal menemukan energinya kembali melalui kedekatan budaya yang membuat warga merasa didengar.

Namun, peluang ini dibarengi oleh tantangan besar, yaitu kecenderungan pergeseran demokrasi ke arah politik personalistik tanpa mekanisme akuntabilitas yang kuat. Ketika partisipasi warga tumbuh bukan karena kesadaran institusional, tetapi karena keterikatan emosional terhadap satu figur, maka ketergantungan pada personalitas pemimpin menjadi dominan. Dalam kasus Dedi, banyak persoalan yang seharusnya ditangani oleh lembaga formal justru menumpuk pada satu figur yang selalu hadir. Hal ini menimbulkan risiko terjadinya delegitimasi institusi pemerintah daerah karena warga merasa lebih percaya pada pemimpin tertentu dibanding kanal resmi pemerintahan. Demokrasi lokal kemudian berjalan bukan melalui sistem yang transparan, tetapi melalui kecepatan respons seorang figur yang tidak memiliki mekanisme pengawasan memadai.

Demokrasi deliberatif Habermas, melihat kondisi ini menunjukkan kemunduran kualitas ruang publik. Dalam model Habermasian, demokrasi hanya dapat bekerja secara sehat apabila keputusan politik lahir dari proses komunikasi yang rasional, inklusif, setara, dan bebas dari dominasi. Namun, ketika warga lebih mempercayai tindakan individual seorang pemimpin daripada prosedur kelembagaan, ruang diskursif yang seharusnya menjadi tempat pertukaran argumentasi berubah menjadi ruang yang didominasi oleh figur karismatik. Proses deliberasi publik tergeser oleh logika representasi personal, di mana validitas tindakan politik diukur bukan melalui argumentasi rasional atau persetujuan bersama, melainkan melalui performativitas moral yang ditampilkan oleh pemimpin tersebut.

Dalam konteks ini, kehadiran Dedi sebagai "pemimpin yang selalu hadir" menciptakan struktur ketergantungan yang melemahkan kapasitas warga untuk berpartisipasi secara deliberatif. Warga tidak lagi mendorong problem mereka ke dalam forum musyawarah, pertemuan warga, atau mekanisme birokratis yang transparan, tetapi langsung menyampaikannya kepada figur tunggal yang dianggap sebagai solusi instan. Pola interaksi seperti ini menutup kesempatan untuk membangun ruang publik yang sehat karena ekspektasi politik terpusat pada tindakan personal pemimpin, bukan pada dialog kolektif atau penguatan institusi demokratis. Dengan demikian, demokrasi lokal berjalan dalam mode yang emosional dan personalistik, bertentangan dengan visi Habermas mengenai ruang publik sebagai arena rasionalitas komunikatif yang memungkinkan terbentuknya kehendak bersama berdasarkan argumentasi, bukan karisma individual.

Tantangan lain muncul ketika simbol budaya yang awalnya memperkuat partisipasi justru bisa berubah menjadi alat reproduksi kekuasaan yang sulit dikritisi. Ketika pemimpin dipandang sebagai representasi moral budaya dan penjaga tradisi, warga cenderung menempatkan mereka pada posisi yang tidak tersentuh kritik. Dalam konteks Dedi, penggunaan simbol-simbol budaya Sunda menempatkannya sebagai figur "pamimpin sakaligus sesepuh" sehingga kritik sering dianggap sebagai serangan terhadap nilai budaya itu sendiri. Hal ini tampak dalam unggahan Instagram terkait polemik perubahan nama RS Al-Ihsan menjadi Welas Asih, di mana respons warganet bergeser dari substansi layanan kesehatan menjadi pembelaan identitas kultural. Dukungan emosional semacam ini menunjukkan bagaimana legitimasi berbasis budaya dapat menutup ruang evaluasi rasional terhadap kebijakan dan kinerja pemimpin.



Gambar 3. Dedi Mulyadi Menanggapi Pengkritik Pergantian Nama Rumah Sakit

Dari perspektif demokrasi deliberatif Habermas, situasi ini menunjukkan bagaimana ruang publik dapat mengalami distorsi ketika simbol budaya dipakai sebagai sumber legitimasi politik yang tak tersentuh. Dalam model deliberatif, ruang publik ideal harus memungkinkan warga menyampaikan kritik, menguji klaim kebenaran, dan mempertimbangkan argumen secara rasional tanpa tekanan simbolik maupun emosional. Namun, ketika pemimpin diposisikan sebagai penjaga nilai budaya, kritik terhadap kebijakannya berubah menjadi seolah-olah serangan terhadap identitas kolektif. Kondisi ini menciptakan komunikasi yang tidak lagi didasarkan pada argumen rasional, melainkan pada relasi kekuasaan simbolik.

Reaksi warganet terhadap kritik terhadap Dedi memperlihatkan bagaimana identitas budaya berfungsi sebagai mekanisme proteksi simbolis. Alih-alih menilai substansi kritik terhadap layanan kesehatan publik, komentar publik justru diarahkan pada pembelaan identitas, yaitu melindungi figur pemimpin karena ia dianggap mewakili kehormatan Sunda. Pola ini menciptakan bentuk "solidaritas kultural" yang bersifat emosional, bukan deliberatif. Dalam kondisi seperti ini, ruang publik kehilangan sifat kritisnya karena setiap kritik secara otomatis dipersepsikan sebagai ancaman terhadap komunitas budaya, bukan sebagai bagian dari proses evaluasi demokratis. Dengan demikian, penggunaan simbol budaya dalam populisme kultural tidak hanya menciptakan kedekatan emosional, tetapi juga membuka peluang terbentuknya ruang publik yang timpang, di mana rasionalitas komunikatif Habermas tersubstitusi oleh loyalitas kultural dan pembelaan identitas yang menghambat kritik terhadap pemegang kekuasaan.

Demokrasi lokal pada akhirnya menghadapi dilema antara partisipasi yang meningkat melalui pendekatan kultural versus risiko menguatnya personalisasi kekuasaan. Peluang dan tantangan ini memperlihatkan bahwa demokrasi yang dekat dengan kultur memang lebih mudah diterima masyarakat, tetapi tetap memerlukan institusi yang kuat agar representasi tidak bergantung pada figur melainkan pada mekanisme yang demokratis. Studi kasus Dedi Mulyadi mengajarkan bahwa demokrasi lokal harus mampu menyerap kekuatan budaya tanpa terjebak dalam ketergantungan pada pemimpin tertentu sehingga partisipasi warga dapat berkelanjutan dan tidak hanya muncul di sekitar magnet personal politik.

Agar pengalaman politik lokal seperti yang terlihat pada figur Dedi Mulyadi tidak berhenti pada kedekatan emosional atau performativitas populis, demokrasi perlu bergerak menuju bentuk yang lebih substantif. Penguatan lembaga partisipatif di tingkat lokal menjadi

kunci untuk memastikan bahwa energi politik yang tercipta dari kedekatan budaya dan respon cepat pemimpin dapat berubah menjadi gerakan sosial-politik yang berkelanjutan. Selama ini, partisipasi warga di banyak daerah, termasuk di wilayah yang menjadi basis dukungan Dedi, muncul terutama karena ikatan personal, bukan karena mekanisme demokratis yang memungkinkan warga berperan secara setara. Ketika kanal partisipasi dibangun kembali melalui lembaga formal, seperti musyawarah desa, forum aspirasi publik, atau mekanisme pengawasan kebijakan daerah, keterlibatan warga dapat lebih stabil dan tidak bergantung pada figur yang sedang populer.

Dalam konteks Dedi, banyak aspirasi yang sebenarnya bisa menjadi dasar penyusunan kebijakan struktural justru berhenti sebagai interaksi personal yang selesai pada tindakan cepat di lapangan. Misalnya, keluhan warga soal pendidikan, infrastruktur, atau konflik sosial sering terselesaikan secara *ad hoc* melalui aksi langsung pemimpin, tetapi tidak selalu berubah menjadi agenda kebijakan yang dirancang bersama masyarakat. Tanpa lembaga partisipatif yang kuat, pola ini menciptakan "partisipasi instan" yang memberi kepuasan jangka pendek tetapi tidak mengubah akar persoalan. Demokrasi substantif membutuhkan proses di mana pengalaman konkret warga terhubung ke perumusan kebijakan melalui mekanisme deliberatif, sehingga tindakan pemimpin bukan hanya respons personal, tetapi terintegrasi dalam sistem yang berkelanjutan.

Program "*Pendidikan Militer*" Dedi Mulyadi merupakan aksi *ad hoc* personalistik yang hanya memberikan kepuasan populis jangka pendek, gagal mentransformasi indisipliner siswa menjadi kebijakan struktural yang berkelanjutan. Solusi ini melemahkan demokrasi substantif karena melangkahi mekanisme deliberatif formal, seperti musyawarah dewan pendidikan, dan justru memperkuat ketergantungan warga pada performativitas figur tunggal. Sebaliknya, pendekatan yang deliberatif dapat menuntut pembentukan Komite Sekolah yang rasional dan inklusif untuk menganalisis akar masalah, lalu mengintegrasikan hasil musyawarah tersebut ke dalam sistem melalui Peraturan Daerah (Perda) dan alokasi anggaran tetap, memastikan solusi menjadi agenda kebijakan publik yang stabil dan tidak bergantung pada karisma individu.

Menguatkan demokrasi substantif juga berarti menata ulang hubungan antara simbol budaya dan tata kelola politik. Nilai-nilai lokal yang digunakan Dedi, seperti gotong royong, kedekatan sosial, dan penghormatan pada tradisi memang efektif membangun kepercayaan masyarakat. Namun, agar nilai-nilai ini benar-benar memperkuat demokrasi, mereka perlu diterjemahkan ke dalam institusi, misalnya melalui forum musyawarah yang inklusif, atau mekanisme penilaian kinerja pemimpin yang dirumuskan bersama masyarakat. Ketika simbol budaya hanya berada di tangan pemimpin, ia menjadi alat mobilisasi, tetapi ketika ia diinstitusikan, ia menjadi dasar partisipasi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, menuju demokrasi substantif berarti memindahkan energi politik dari figur menuju proses. Pengalaman kedekatan yang dibangun Dedi Mulyadi dapat menjadi titik awal, tetapi ia harus ditopang oleh struktur demokrasi yang memungkinkan warga mengambil keputusan bersama, mengawasi kekuasaan, dan mengartikulasikan kepentingan secara kolektif. Tanpa langkah ini, populisme lokal hanya akan menghasilkan partisipasi sesaat yang menguatkan personalisasi kekuasaan. Namun, dengan penguatan lembaga partisipatif, populisme dapat bertransformasi menjadi gerakan sosial-politik yang lebih matang, otentik, dan memberi ruang bagi warga untuk menjadi subjek politik dalam arti yang sebenarnya.

Kesimpulan

Analisis terhadap gaya politik Dedi Mulyadi menunjukkan bahwa populisme kultural dalam konteks politik lokal di Jawa Barat berfungsi sebagai respons terhadap krisis representasi yang dirasakan masyarakat. Melalui penggunaan simbol budaya Sunda, narasi kedekatan yang menekankan kesetaraan dan kehadiran, serta strategi komunikasi digital yang menampilkan interaksi langsung dengan warga, Dedi membangun legitimasi politik berbasis kedekatan emosional. Praktik ini menegaskan bahwa demokrasi lokal kerap berjalan melalui bahasa budaya dan relasi sosial yang akrab bagi masyarakat, bukan semata lewat mekanisme institusional yang formal. Namun pendekatan ini juga menghadirkan paradoks: meski memperkuat partisipasi, ia membuka risiko bagi kualitas demokrasi, seperti penyederhanaan persoalan struktural, pergeseran fokus dari kebijakan jangka panjang ke penyelesaian ad hoc, serta melemahnya ruang evaluasi dan penalaran publik.

Ketergantungan pada figur yang dianggap autentik berpotensi menurunkan peran lembaga representatif dan akuntabilitas politik, sehingga demokrasi dijalankan melalui magnet personalitas alih-alih proses yang setara dan inklusif. Dalam konteks tersebut, pengalaman politik lokal melalui figur seperti Dedi Mulyadi mencerminkan kebutuhan masyarakat akan demokrasi yang lebih kontekstual, kultural, dan dekat secara emosional. Namun untuk mencapai demokrasi substantif, energi populisme kultural perlu diarahkan pada penguatan institusi partisipatif dan mekanisme deliberasi publik yang mampu menerjemahkan aspirasi warga menjadi kebijakan berkelanjutan. Dengan demikian, populisme kultural dapat menjadi pintu masuk revitalisasi demokrasi lokal, tetapi hanya berkontribusi positif jika diimbangi oleh institusi yang kuat, ruang publik terbuka, serta proses komunikasi politik yang mengutamakan rasionalitas dan inklusivitas.

Referensi

Agrraeni, T., Saputra, G., Hasnah, U. N., & Ruhimat Putri, R. N. (2023). Ancaman Terhadap Demokrasi: Mengatasi Populisme dan Otoritarianisme. *ADVANCES in Social Humanities Research*.

Aprilianto, T. (2025). KONSEP POPULISME KIRI DALAM KRITIK DEMOKRASI LIBERAL PADA PEMIKIRAN CHANTAL MOUFFE DAN ERNESTO LACLAU. *PRATYAKSA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Humaniora*.

Bagaskara, B. (2024, November 30). *Jejak Politik Dedi Mulyadi, dari Subang menuju Gedung Pakuan*. Retrieved from detikJabar: https://www.detik.com/jabar/pilkada/d-7662323/jejak-politik-dedi-mulyadi-dari-subang-menuju-gedung-pakuan

Braokah, E., Sajati, F. D., Sulistiawati, Fadhilah, N., & Khofifah, N. (2025). GAYA KEPEMIMPINAN DEDI MULYADI : ANALISIS 3 BULAN PERTAMA SEBAGAI GUBERNUR JAWA BARAT. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*.

Haboddin, M. (2019). Populisme sebagai Bentuk Politik Pertahanan Pemimpin Lokal . *Jurnal Politik Walisongo, I*(1), 21-28. https://doi.org/ 10.21580/jpw.2019.1.1.2335

Haboddin, M. (2019). POPULISME, POLITIK PERTAHANAN, DAN PEMIMPIN LOKAL. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*.

Herkman, J. (2022). *A Cultural Approach to Populism.* Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003267539

Hilmy, M. I. (2020). FENOMENA GERAKAN POPULISME DALAM KEMUNDURAN DEMOKRASI. *Jurnal Civic Hukum*. https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13080

Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.

Junaeda, S., & Khaerunnisa. (2024). Dinamika Populisme di Era Digital: Pengaruh Media Sosial Terhadap Pemikiran Politik Masyarakat. *Journal of Education and Culture*.

Kasanova, R., & Rudiyanto, M. (2024). Dampak Kebangkitan Populisme Terhadap Demokrasi di Indonesia. *JSPH : Jurnal SosialPolitik Humaniora*.

Kompas. (2025, April 28). Dialog Dedi Mulyadi Bareng Siswa Baru Lulus SMA, Pro Kontra soal Wisuda. Jakarta, Jakarta, Indonesia.

Margiansyah, D. (2019). Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019. *Journal of Political Research, XVI*(1).

Marwah, S., Sugiarto, B., & Said Akbar, A. A. (2024). *Pengantar Studi Demokrasi.* Universitas Jenderal Soedirman Gd. BPU Percetakan dan Penerbitan.

Muthhar, M. A. (2016). MEMBACA DEMOKRASI DELIBERATIF JURGEN HABERMAS DALAM DINAMIKA POLITIK INDONESIA . *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*.

Oksibil. (2025, November 15). *Dedi Mulyadi: Profil, Perjalanan Karier, Kontroversi, dan Pengaruhnya di Dunia Politik Indonesia*. Retrieved from KPU: https://kab-pegununganbintang.kpu.go.id/blog/read/8757_dedi-mulyadi-profil-perjalanan-karier-kontroversi-dan-pengaruhnya-di-dunia-politik-indonesia

Perdana, K. E. (2025). Komunikasi Politik Populis dalam Kontestasi Elektoral: Studi Kasus Kampanye Pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Hermawan pada Pilgub Jawa Barat . *JURNAL KOMUNIKASI DIALOGIS , I*(1).

Prasetyo, A. G. (2012). Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik. *JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.

Ritonga, A. D., & Adela, F. P. (2020). Mencermati Populisme Prabowo Sebagai Bentuk Gaya Diskursif Saat Kampanye Politik Pada Pemilihan Presiden 2019. *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik*.

Safarudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*.

Sihidi, I. T., Roziqin, A., & Suhermanto, D. F. (2020). Pertarungan Populisme Islam dalam Pemilihan Presiden 2019. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.

Sudjaya, M. I. (2025, Mei 7). *Sunda Bakti di Tangan Kang Dedi Mulyadi*. Retrieved from Kumparan.com: https://kumparan.com/muhammad-iqbal-ash-siddiq-sudjaya-1664549064121066177/sunda-bakti-di-tangan-kang-dedi-mulyadi-24yfec1lW91/4

Syaidah, A., Ramayanti, A., Azuri, R., Hansolina, Y., & Syafril, R. (2025). MENGUAK TABIR KEPEMIMPINAN DEDI MULYADI: JAWA BARAT MENUJU PERUBAHAN MASIF. *JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA, II*(6).

Ufen, A. (2019). Populisme: Dampak Ekonomi dan Politiknya yang Ambivalen. In P. I. POPULISME, *Dinna Wisnu* (pp. 27-34). Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

Welak, F. (2022). POPULISME DI INDONESIA: ANCAMAN BAGI INTEGRITAS MASYARAKAT DAN REAKTUALISASI PANCASILA . *Pancasila : Jurnal Keindonesiaan, II*(1), 62-70.